

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab dalam melaksanakan unsur koperasi dan usaha mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016.

Sebagai salah satu perangkat birokrasi, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus menyajikan laporan hasil kerja selama satu Tahun Anggaran, sebagaimana PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014. Laporan hasil kerja tersebut terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang merupakan strategi dan hasil evaluasi kinerja selama satu Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian Laporan Kinerja ini disamping sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama satu Tahun Anggaran, juga dapat dipergunakan sebagai bahan informasi bagi publik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri,

2021

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI



MAULANA MIYATI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660720 199003 2 008

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i	
Kata Pengantar.....	ii	
Daftar Isi.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1 Latar Belakang.....	1
	2 Maksud dan Tujuan.....	1
	3 Dasar Hukum.....	2
	4 Gambaran Umum.....	2
	5 Sumber Daya Aparatur.....	5
	6 Sistematika Pelaporan.....	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	7
	1. RENCANA STRATEGIS.....	7
	1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	7
	1.2 Tujuan.....	7
	1.3 Sasaran.....	7
	1.4 Strategi yang diambil Dinas Koperasi Usaha Mikro.	8
	1.5 Kebijakan yang diambil Dinas Koperasi Usaha Mikro	8
	2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	9
	3 Program/Kegiatan Tahun 2021.....	10
	4 Anggaran Tahun 2021.....	15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
	1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
	2 Pencapaian Kinerja Sasaran	25
	3 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran).....	27
BAB IV	PENUTUP.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu Dinas yang tugas dan fungsinya membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor: 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang disahkan pada tanggal 16 September 2016 yang didalamnya termuat tipe dan urusan yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

Tahun Anggaran 2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri telah melaksanakan pembangunan di bidang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro serta pengawasan koperasi. Melalui beberapa kegiatan antara lain pelatihan ketrampilan usaha mikro, fasilitasi perizinan untuk usaha mikro, pelatihan manajemen usaha untuk usaha mikro, pelatihan pemasaran untuk usaha mikro, fasilitasi pemasaran untuk usaha mikro, bimtek untuk peningkatan kinerja koperasi, pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemeringkatan koperasi, serta bantuan sosial untuk Usaha Mikro yang terdampak covid 19 di Kabupaten Kediri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah khususnya pada Misi ke 8 Kabupaten Kediri.

Tujuan : penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat

menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

3. Dasar Hukum

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri sebagai lembaga teknis yang membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan landasan hukum:

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lakip ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

1. GAMBARAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri serta Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi antara lain :

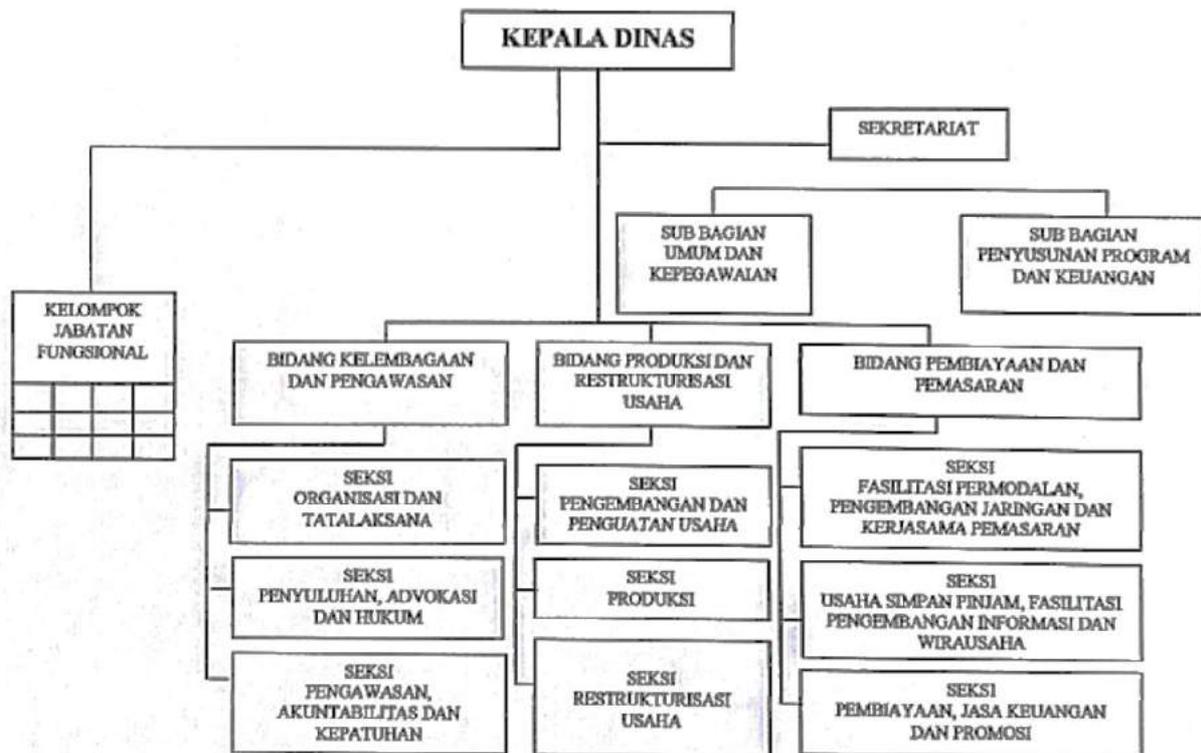
- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pembinaan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan administrasi koperasi, Usaha Mikro daerah Kabupaten.

Berdasarkan Susunan Organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari 2(dua) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari 3(tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana
 2. Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum
 3. Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan

- c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha terdiri dari 3(tiga) seksi yaitu :
1. Seksi Pembangunan dan Penguatan Usaha
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Restrukturisasi Usaha
- d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran terdiri dari 3(tiga) seksi yaitu :
1. Seksi Fasilitasi Permodalan, Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran
 2. Seksi Usaha Simpan Pinjam, Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha
 3. Seksi Pembiayaan, Jasa Keuangan dan Promosi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :



2. SUMBER DAYA APARATUR

Tenaga kerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2021 dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut jenis pendidikannya, terdapat pegawai tetap dan tidak tetap (kontrak).

Tabel : 1.1.
DAFTAR PEGAWAI TETAP

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4 Orang
2	S1	13 Orang
3	SARMUD/D3	1 Orang
4	DI/D2	0 Orang
5	SLTA	5 Orang
6	SLTP	1 Orang
Total		24 Orang

Tabel : 1.2.
DAFTAR PEGAWAI KONTRAK

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	0 Orang
2	S1	7 Orang
3	SARMUD/D3	1 Orang
4	DI/D2	2 Orang
5	SLTA	2 Orang
6	SLTP	0 Orang
7	SD	1 Orang
Total		13 Orang

Tabel : 1.3.
Pegawai Berdasarkan golongan dan pangkat.

No	Gol	Jumlah
1	I	1 Orang
2	II	4 Orang
3	III	15 Orang
4	IV	4 Orang
Total		24 Orang

Tabel : 1.4.

Distribusi Sumber Daya Manusia.

NO	BIDANG	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	1 Orang
2	SEKRETARIAT	11 Orang
3	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	8 Orang
4	BIDANG PRODUKSI DAN RESTRUKTURISASI USAHA	9 Orang
5	BIDANG PEMBIAYAAN DAN PEMASARAN	8 Orang
TOTAL		37 Orang

6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, berdasarkan sistematis penyusunan sebagai berikut :

A. BAB I s/d BAB IV, meliputi :

- BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Dinas, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Gambaran Umum, Sumber Daya Aparatur serta Sistematika Pelaporan.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja
- BAB IV : Penutup, menguraikan tentang Tinjauan Umum mengenai Keberhasilan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang

B. LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisikan antara lain :

1. Indikator Kinerja Utama 2016 – 2021
2. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021
3. Perjanjian Kinerja Dinas Kopusmik 2021
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
5. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna memperhitungkan **Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Tantangan / kendala (Threats)** yang ada.

1. RENCANA STRATEGIS.

1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.***

MISI di dalam misi Kabupaten Kediri bidang yang ditangani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri masuk dalam misi Bupati yang ke 8 (delapan) sebagai berikut :

Misi ke 8 (delapan) yang berbunyi “ Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan”.

1.2 TUJUAN

- 1.2.1 Meningkatkan kualitas koperasi.
- 1.2.2 Meningkatkan jumlah dan kualitas serta volume usaha koperasi.
- 1.2.3 Menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan volume usaha mikro.

1.3 SASARAN

- 1.3.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha dan kinerja koperasi.
- 1.3.2 Meningkatnya kinerja KSP/USP/KSPPS/USPPS koperasi simpan pinjam.
- 1.3.3 Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro.

1.4 STRATEGI YANG DIAMBIL DINAS KOPERASI USAHA MIKRO.

- 1.4.1 Meningkatkan pemasyarakatan koperasi/Usaha Mikro dan meningkatkan kemampuan SDM di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- 1.4.2 Meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam;
- 1.4.3 Meningkatkan jiwa kewirausahaan.

1.5 KEBIJAKAN YANG DIAMBIL DINAS KOPERASI USAHA MIKRO.

- 1.5.1 Peningkatan kelembagaan dan SDM pembinaan dalam penyelenggaraan diklat perkoperasian dan pelatihan ketrampilan;
- 1.5.2 Peningkatan kapasitas usaha simpan pinjam dan pengendalian simpan pinjam;
- 1.5.3 Peningkatan pengembangan kerjasama Usaha Mikro melalui penyelenggaraan promosi.

Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan *Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri* Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan

Visi : Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat Kab. Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan yang didukung oleh aparaturnya pemerintah yang profesional			
MISI 8 : Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko-guru pembangunan ekonomi kerakyatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan pemasyarakatan koperasi/Usaha Mikro dan meningkatkan kemampuan SDM di bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan kelembagaan dan SDM pembinaan dalam penyelenggaraan diklat perkoperasian
Meningkatkan KSP/USP/KSPPS/USPPS koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif	Meningkatnya kinerja KSP/USP/KSPPS/USPPS koperasi simpan pinjam	Meningkatkan standar prosedur dan kesehatan koperasi simpan pinjam	Peningkatan kapasitas usaha simpan pinjam dan pengendalian simpan pinjam
Menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan volume usaha mikro	Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan volume usaha mikro	Meningkatkan jiwa kewirausahaan	Peningkatan pengembangan kerjasama Usaha Mikro melalui penyelenggaraan promosi

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja yang tertuang didalam Dokumen Penetapan Kinerja terdiri dari Sasaran Strategis, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta besaran pagu anggaran masing-masing program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Semua kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2021 berpedoman kepada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2021 guna untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dan prosentase target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri bersumber dari Surat Keputusan Bupati Kediri No. 188.45/345/418.08/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri bersama Bupati Kediri ada 2 (dua) Sasaran yaitu :

Sasaran Pertama ***"Meningkatnya kualitas kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi"*** Dengan Indikator kinerja dan target sasaran yang ingin di capai sebagai berikut :

- a) Prosentase koperasi aktif dengan target 71,00%
- b) Prosentase koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat dengan target 5,03%

Sasaran kedua ***"Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro"*** Dengan Indikator kinerja dan target sasaran yang ingin di capai sebagai berikut :

- a) Prosentase peningkatan wirausaha baru dengan target 89,79%
- b) Prosentase usaha mikro yang berizin dengan target 4,72%
- c) Prosentase usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat dengan target 71,31%

3. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2021

Penerapan atau pelaksanaan Perjanjian Kinerja dirumuskan kedalam Program dan Kegiatan sebanyak 7 (tujuh) Program dan 12 (dua belas) sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun

- ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- ii. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 4 sub kegiatan yaitu:
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator dari sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator dari sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai
 - iii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun
- iii. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
 - i. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- iv. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti diklat
 - ii. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
- v. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 6 sub kegiatan yaitu:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan
- iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - iv. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga
 - v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah
 - vi. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
 - i. Pengadaan Mebel
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah mebel yang diadakan
 - vii. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa surat menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator sub kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - viii. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannya
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan kerja yang di perbaiki
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala

II. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:

i. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), dan yang mengikuti bimtek pemeringkatan

ii. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan dan aplikasi sappakop

III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:

ix. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya

IV. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu :

i. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SMD koperasi

b. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu :

- i. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SMD usaha mikro

V. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:

- i. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya

VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:

- i. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan dan sosialisasi perizinan

- ii. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya

VII. Program Pengembangan UMKM

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:

- i. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan

4. Anggaran Tahun 2021

Program dan pagu anggaran terdiri dari 7 (tujuh) program dan 15 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.468.907.592,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.087.297.982
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp. 336.362.660
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp. 30.600.270
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp. 657.872.780
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 38.882.900
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 5.806.870.500
7. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 511.020.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Termasuk di dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah adalah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan Misi suatu instansi bersangkutan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan Misi Organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari pelaksanaan dan capaian Kinerja yang setiap tahunnya ditetapkan dalam *Perjanjian Kinerja* Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri bersama Bupati Kediri dan **Rencana Strategis Dinas** lima tahunan berdasar 3 (tiga) komponen yaitu: **Sasaran strategis, Indikator kinerja dan Target**.

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian kinerja organisasi merupakan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Dalam capaian kinerja organisasi ini di sampaikan hasil pengukuran hasil kinerja Program dan kegiatan, Sasaran Strategis Dinas dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2021

1.1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 7 program dan 15 kegiatan. Adapun Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk masing-masing kegiatan dan program dengan dibandingkan dengan tahun lalu 2021 adalah sebagai berikut :

1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja *out come* "cakupan penyediaan administrasi penunjang

urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota", target 100% realisasi 100%
capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%

- 1.1.2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator kinerja out come "Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi", target 8,77% realisasi 13,90% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 158,49%
- 1.1.3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator kinerja out come "Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat", target 1% realisasi 1,23% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 123%
- 1.1.4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan indikator kinerja out come "Persentase SDM Koperasi terlatih", target 0,10% realisasi 0,28% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 280,00%
- 1.1.5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator kinerja out come "Persentase Partisipasi Koperasi Aktif", target 13,39% realisasi 12,67% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 94,62%.
- 1.1.6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja out come "Persentase Partisipasi Usaha Mikro", target 13,86% realisasi 15,68% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 113,13%
- 1.1.7. Program Pengembangan UMKM dengan indikator kinerja out come "Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya", target 2,31% realisasi 4,37% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 189,77%

Lebih jelas dapat di lihat pada format data *Realisasi Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Th. 2021* Tabel berikut ini :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 (%)						
				I		II		III		IV		9 = 5+6+7+8		10 = 9/4 x 100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	1																			
2	1	0	2	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	1	0	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cekupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	5.087.297.982	-	631.110.930	967.101.372	981.091.939		0	4.121.714.374,00			81,02%		
2	1	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	6.970.800	-	-	2 laporan	2.340.200	1 laporan	941.100	4 laporan	3.147.600	7 laporan	6.429.100,00	86%	92,23%
2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 laporan	2.546.400	-	-				3 laporan	2.004.700	3 laporan	2.004.700,00	67%	78,73%	
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4.424.400	-	-	2 laporan	2.340.200	1 laporan	941.100	1 laporan	1.143.100	4 laporan	4.424.400,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.690.365.094	3 bulan	631.110.930	3 bulan	886.341.502	3 bulan	906.007.602	3 bulan	685.516.207	12 bulan	3.108.976.241,00	100%	84,25%
2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.072.526.800	3 bulan	613.680.930	3 bulan	613.680.930	3 bulan	750.644.296	3 bulan	514.119.689	12 bulan	2.492.125.845,00	100%	81,11%
2	1	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	12 bulan	393.990.794	3 bulan	-	3 bulan	182.830.572	3 bulan	96.755.806	3 bulan	114.396.518	12 bulan	393.982.896,00	100%	100,00 %

2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	220.950.000	3 bulan	17.430.000	3 bulan	89.830.000	3 bulan	55.710.000	3 bulan	57.000.000	12 bulan	219.970.000,00	100%	99,56%
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	2.897.500	-	-	-	1 laporan	2.897.500	-	-	1 laporan	2.897.500,00	100%	100,00 %	
2	1	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	1 bulan	6.259.200	3 bulan	-	3 bulan	2.759.200	3 bulan	220.000	3 bulan	3.280.000	12 bulan	6.259.200,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	6.259.200	3 bulan	-	3 bulan	2.759.200	3 bulan	220.000	3 bulan	3.280.000	12 bulan	6.259.200,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi kepegawalan perangkat daerah	12 bulan	900.000.000	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	-	3 bulan	534.753.000	12 bulan	534.753.000,00	100%	59,42%
2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!
2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	1550 orang	900.000.000	-	-	-	-	-	-	1500 orang	534.753.000	1500 orang	534.753.000,00	97%	59,42%
2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	166.591.969	3 bulan	-	3 bulan	26.129.964	3 bulan	58.277.060	3 bulan	87.045.400	12 bulan	166.452.424,00	100%	99,92%
2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 bulan	10.299.740	-	-	-	2 bulan	10.299.740	-	-	2 bulan	10.299.740,00	100%	100,00 %	
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sedakan	11 unit	64.665.000	-	-	-	-	-	-	11 unit	64.665.000	11 unit	64.665.000,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	12 bulan	24.579.787	3 bulan	-	3 bulan	15.089.507	3 bulan	5.489.280	3 bulan	4.000.000	12 bulan	24.578.787,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	33.337.585	3 bulan	-	3 bulan	327.000	3 bulan	30.480.040	3 bulan	2.530.400	12 bulan	33.337.440,00	100%	100,00 %

2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.296.000	3 bulan	-	3 bulan	2.050.000	3 bulan	1.608.000	3 bulan	1.640.000	12 bulan	5.298.000,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamn rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	28.411.857	3 bulan	-	3 bulan	8.663.457	3 bulan	5.400.000	3 bulan	14.210.000	12 bulan	28.273.457,00	100%	99,51%
2	1	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	waktu penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!
2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	22 unit	137.450.000	-	-	-	-	-	-	22 unit	125.561.500	22 unit	125.561.500,00	95%	91,35%
2	1	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	22 unit	137.450.000	-	-	-	-	-	-	22 unit	125.561.500	22 unit	125.561.500,00	95%	91,35%
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	66.268.419	3 bulan	-	3 bulan	31.129.406	3 bulan	13.604.177	3 bulan	15.852.406	12 bulan	60.585.989,00	100%	91,43%
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	9.150.000	3 bulan	-	3 bulan	7.750.000	3 bulan	600.000	3 bulan	800.000	12 bulan	9.150.000,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	57.118.419	3 bulan	-	3 bulan	23.379.406	3 bulan	13.004.177	3 bulan	15.052.406	12 bulan	51.435.989,00	100%	90,06%
2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	21 unit	113.992.500	-	-	8 unit	18.401.100	5 unit	7.042.000	8 unit	87.253.820	21 unit	112.696.920,00	100%	99,39%
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin dan perizinannya	10 kendaraan dinas	26.500.000	-	-	2 kendaraan dinas	5.201.100	3 kendaraan dinas	2.642.000	5 kendaraan dinas	18.133.500	10 kendaraan dinas	25.976.600,00	100%	98,02%

2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	10 unit	22.000.000	-	-	6 unit	13.200.000	2 unit	4.400.000	2 unit	4.400.000	10 unit	22.000.000,00	100%	100,00 %
2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 gedung kantor	64.720.500	-	-	-	-	-	-	1 gedung kantor	64.720.320	1 gedung kantor	64.720.320,00	100%	99,73%
2	1	0	7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	302 kop	336.362.660	-	-	68 kop	22.150.000	54 kop	5.559.000	174 kop	272.617.200	296 kop	300.326.200,00	98%	89,29%
2	1	0	7	3	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	302 kop	336.362.660	-	-	68 kop	22.150.000	54 kop	5.559.000	174 kop	272.617.200	296 kop	300.326.200,00	98%	89,29%
2	1	0	7	3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev (pengawasan dan pemeriksaan), yang mengikuti bimtek peneringkatan dan sosialisasi pra dan hasil pengawasan koperasi	127 kop	182.819.860	-	-	3 kop	1.520.000	54 kop	5.559.000	64 kop	157.267.800	121 kop	164.346.800,00	95%	89,90%
2	1	0	7	3	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan, revitalisasi koperasi dan peserta studi banding perkerjasama	175 orang	153.542.800	-	-	65 orang	20.680.000	-	-	110 orang	115.349.400	175 orang	135.979.400,00	100%	88,56%
2	1	0	7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	125 kop	30.600.270	-	-	-	-	100 kop	28.010.700	25 kop	736.000	125 kop	28.746.700,00	100%	93,94%

2	1	0	2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya	125 kop	30.600.270	-	-	-	100 kop	28.010.700	25 kop	736.000	125 kop	28.746.700,00	100%	93,94%	
2	1	0	2	0 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	125 kop	30.600.270	-	-	-	100 kop	28.010.700	25 kop	736.000	125 kop	28.746.700,00	100%	93,94%	
2	1	0	2	0 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	
2	1	0	2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	415 orang	584.802.220	-	-	75 orang	93.880.200	150 orang	103.346.810	190 orang	332.994.190	415 orang	530.221.200,00	100%	90,67%
2	1	0	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	415 orang	584.802.220	-	-	75 orang	93.880.200	150 orang	103.346.810	190 orang	332.994.190	415 orang	530.221.200,00	100%	90,67%
2	1	0	2	0 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SMD koperasi	415 orang	584.802.220	-	-	75 orang	93.880.200	150 orang	103.346.810	190 orang	332.994.190	415 orang	530.221.200,00	100%	90,67%
2	1	0	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	125 orang	38.882.900	-	-	-	-	100 orang	35.831.900	-	-	100 orang	35.831.900,00	80%	92,15%
2	1	0	2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan	125 orang	38.882.900	-	-	-	-	100 orang	35.831.900	-	-	100 orang	35.831.900,00	80%	92,15%

2	1	0	2	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Milal Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	125 orang	38.882.900	-	-	-	100 orang	35.831.900	-	-	100 orang	35.831.900,00	80%	92,15%			
2	1	0	7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	731 orang	5.806.870.500	-	-	30 orang	20.951.250	90 orang	39.472.500	561 orang	5.424.703.590	561 orang	5.485.127.940,00	77%	94,46%		
2	1	0	7	7	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitas perizinan, sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM	731 orang	5.806.870.500	-	-	30 orang	20.951.250	90 orang	39.472.500	561 orang	5.424.703.590	681 orang	5.485.127.940,00	93%	94,46%	
2	1	0	7	7	0	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas perizinan dan sosialisasi perizinan	490 orang	460.692.500	-	-	-	-	440 orang	227.743.440	440 orang	227.743.440,00	90%	49,44%		
2	1	0	7	7	0	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan kelembagaannya dan dikembangkan usahanya	241 orang	5.346.178.000	-	-	30 orang	20.951.250	90 orang	39.472.500	121 orang	5.196.960.150	241 orang	5.257.383.900,00	100%	98,34%
2	1	0	7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKUM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	250 orang	511.020.500	-	-	140 orang	201.150.350	60 orang	38.334.000	44 orang	111.902.000	244 orang	351.386.350,00	98%	68,76%		
2	1	0	7	8	0	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran	250 orang	511.020.500	-	-	140 orang	201.150.350	60 orang	38.334.000	44 orang	111.902.000	244 orang	351.386.350	98%	68,76%

2	1	0	2	0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan pelatihan	250 orang	511.020.500	-	-	140 orang	201.150.350	60 orang	38.334.000	44 orang	111.902.000	244 orang	351.386.350	98%	68,76%	
2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 kegiatan	73.070.560	-	-	0	0	0	-	2 kegiatan	67.697.560	2 kegiatan	67.697.560,00	100%	92,65%	
2	1	0	2	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan serta kompetensi SMD usaha mikro	2 kegiatan	73.070.560	-	-	0	0	0	-	2 kegiatan	67.697.560	2 kegiatan	67.697.560	100%	92,65%	
JUMILAH									12.468.907.592		631.110.930		1.305.239.172		1.231.646.849		7.753.090.673		10.921.051.624	87,59	

1. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

1.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri merupakan capaian kinerja sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2021 sebagai berikut :

1.1.1. **SASARAN STRATEGIS** : "Meningkatnya kualitas kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi", capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

1.1.1.1. **INDIKATOR** pertama "**Prosentase koperasi aktif**" target **71,00%** realisasi **54,79%** capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar **77,17%**.

Dengan dasar perhitungan bahwa di tahun 2021 jumlah koperasi di kabupaten Kediri berjumlah 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) Koperasi, sedang yang berstatus sebagai Koperasi Aktif sejumlah 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) koperasi.

1.1.1.2. **INDIKATOR** kedua "**Prosentase koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat**" target **5,03%** realisasi **2,76%** capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar **52,08%**.

Berdasar perhitungan bahwa di tahun 2021 terdapat 18 koperasi yang mendapatkan peningkatan predikat, di bandingkan dengan jumlah koperasi binaan tahun dasar yaitu 652 koperasi

1.1.2. **SASARAN STRATEGIS** "Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro" capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

1.1.2.1. **INDIKATOR** pertama "**Prosentase peningkatan wirausaha baru**" target **89,79%** realisasi **203,95%** capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar **227,14%**.

Dengan dasar perhitungan bahwa sampai dengan tahun 2021 jumlah wirausaha baru di kabupaten Kediri adalah 287, sedangkan sampai dengan tahun 2020 sebesar 132, sedangkan di tahun dasar jumlah wirausaha baru adalah 76.

1.1.2.2. **INDIKATOR** kedua "**Prosentase usaha mikro yang berizin**" target **4,72%** realisasi **22,16 %** capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar **469,49%**.

Dengan dasar perhitungan bahwa di tahun 2021 jumlah Usaha Mikro yang di bina yang mendapatkan perijinan adalah

307 di bandingkan jumlah usaha mikro yang dibina pada tahun 2021 yaitu 1386

1.1.2.3. INDIKATOR ke tiga "**Prosentase usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat**" target 71,31% realisasi 29,17% capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 40,91%.

Dengan dasar perhitungan bahwa di tahun 2021 usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat sebanyak 250 usaha mikro di bandingkan dengan jumlah Usaha Mikro binaan tahun dasar sebesar 857 usaha mikro.

1.2. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kediri 2016 - 2021.

Berdasarkan pengukuran pada tiap-tiap indikator sasaran pada tahun 2021 telah dapat diukur capaian kinerja pada tiap-tiap sasaran, disesuaikan dengan, visi, misi kepala daerah dan tujuan, dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain :

Misi VIII : Mengembangkan koperasi sebagaisalah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan

Tujuan : Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelembagaaan Koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran : *Persentase koperasi aktif. Formula* $(\frac{\sum \text{koperasi aktif}}{\sum \text{koperasi}} \times 100\%)$. dengan target sebesar 71% untuk tahun 2021 realisasi sebesar 54,79% capaian kinerja 77,17%.

: *Persentase pertumbuhan usaha mikro Formula* $(\frac{\sum \text{UM tahun ini} - \sum \text{UM tahun lalu}}{\sum \text{UM tahun dasar}} \times 100\%)$. dengan target sebesar 3,39% untuk tahun 2021 realisasi sebesar 7,33% capaian kinerja 216,22%.

2. . AKUNTABILITAS KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN).

Program dan pagu anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro tahun 2021 terdiri dari 7 (tujuh) program 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.468.907.592 (Dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
Pagu anggaran sebesar Rp. 5.087.297.982 realisasi Rp. 4.121.714.374 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 81,02%.
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
Pagu anggaran sebesar Rp. 336.362.660 realisasi Rp. 300.326.200 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 89,29%.
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi;
Pagu anggaran sebesar Rp. 30.600.270 realisasi Rp.28.746.700 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 93,94%.
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
Pagu anggaran sebesar Rp. 584.802.220 realisasi Rp. 571.685.680 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 97,76%.
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
Pagu anggaran sebesar Rp. 38.882.900 realisasi Rp.35.831.900 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 92,15%.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
Pagu anggaran sebesar Rp. 5.806.870.500 realisasi Rp.5.485.127.340 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 94,46%.
7. Program Pengembangan UMKM;
Pagu anggaran sebesar Rp. 511.020.500 realisasi Rp. 351.386.350 capaian kinerja anggaran tahun 2021 adalah sebesar 68,76%.

Secara keseluruhan anggaran tahun 2021 sebesar Rp.12.468.907.592,- dengan terserap sebesar Rp.10.894.818.544,- (87,38%). Akuntabilitas keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada tahun 2021 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel : 3.2.

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. KEDIRI TH. 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Bulan Desember 2021					%	Silpa Anggaran
						DAU	DAK	DBHCHT	Pajak Rokok	Total		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.087.297.982	3.586.961.374	-	534.753.000	-	4.121.714.374	81,02%	965.683.608
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	6.970.800	6.429.100	-	-	-	6.429.100	92,23%	541.700
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 laporan	3 laporan	2.546.400	2.004.700	-	-	-	2.004.700	78,73%	541.700
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4.424.400	4.424.400	-	-	-	4.424.400	100,00%	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	3.690.366.094	3.108.976.241	-	-	-	3.108.976.241	84,25%	581.388.853
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	3.072.526.800	2.492.125.845	-	-	-	2.492.125.845	81,11%	580.400.955
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pegawai	12 bulan	12 bulan	393.990.794	393.982.896	-	-	-	393.982.896	100,00%	7.898
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	waktu penyediaan administrasi pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	220.950.000	219.970.000	-	-	-	219.970.000	99,56%	980.000
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	2.897.500	2.897.500	-	-	-	2.897.500	100,00%	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	6.259.200	6.259.200	-	-	-	6.259.200	100,00%	-
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	waktu penyediaan jasa penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	6.259.200	6.259.200	-	-	-	6.259.200	100,00%	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	900.000.000	-	-	534.753.000	-	534.753.000	59,42%	365.247.000
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	930 orang	1500 orang	900.000.000	-	-	534.753.000	-	534.753.000	59,42%	365.247.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	166.591.989	166.452.424	-	-	-	166.452.424	99,92%	139.545
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	10.299.740	10.299.740	-	-	-	10.299.740	100,00%	-
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	8 unit	11 unit	64.665.000	64.665.000	-	-	-	64.665.000	100,00%	-
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	24.579.787	24.578.787	-	-	-	24.578.787	100,00%	1.000
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	33.337.585	33.337.440	-	-	-	33.337.440	100,00%	145
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	5.298.000	5.298.000	-	-	-	5.298.000	100,00%	-
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyediaan mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	28.411.857	28.273.457	-	-	-	28.273.457	99,51%	138.400
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang di adakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	50 unit	22 unit	137.450.000	125.561.500	-	-	-	125.561.500	91,35%	11.888.500
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	50 unit	22 unit	137.450.000	125.561.500	-	-	-	125.561.500	91,35%	11.888.500
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	66.268.419	60.585.989	-	-	-	60.585.989	91,43%	5.682.430
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	9.150.000	9.150.000	-	-	-	9.150.000	100,00%	-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	57.118.419	51.435.989	-	-	-	51.435.989	90,05%	5.682.430

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang di pelihara	17 unit	23 unit	113.392.500	112.696.920	-	-	-	112.696.920	99,39%	695.580
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di lakukan pemeliharaan rutin dan perizinannya	6 kendaraan dinas	10 kendaraan dinas	26.500.000	25.976.600	-	-	-	25.976.600	98,02%	523.400
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	10 unit	12 unit	22.000.000	22.000.000	-	-	-	22.000.000	100,00%	-
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di lakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 gedung kantor	1 gedung kantor	64.892.500	64.720.320	-	-	-	64.720.320	99,73%	172.180
B.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	8,77%	13,90%	336.362.660	205.561.200	-	-	94.765.000	300.326.200	89,29%	36.036.460
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diawasi	150 kop	200 kop	336.362.660	205.561.200	-	-	94.765.000	300.326.200	89,28%	36.036.460
a.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di peringkatkan, di monev(pengawasan dan pemeriksaan), dan yang mengikuti bimtek pemeringkatan	125 kop	127 Kop	182.819.880	69.581.800	-	-	94.765.000	184.346.800	89,90%	18.473.060
b.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan dan aplikasi sappekop	210 orang	175 orang	153.542.800	135.979.400	-	-	-	135.979.400	88,56%	17.563.400
C.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	1,00%	1,23%	30.600.270	28.746.700	-	-	-	28.746.700	93,94%	1.863.570

1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya	100 kop	125 kop	30.600.270	28.746.700	-	-	-	28.746.700	93,94%	1.853.570
a.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya dan yang mengikuti bimtek penilaian kesehatan	100 kop	125 kop	30.600.270	28.746.700	-	-	-	28.746.700	93,94%	1.853.570
D.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,10%	0,28%	584.802.220	199.349.010	398.569.750	-	-	571.685.680	97,76%	13.116.540
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	13 kegiatan	15 kegiatan	584.802.220	199.349.010	398.569.750	-	-	597.918.760	102,24%	13.116.540
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SMD koperasi	350 orang	415 orang	584.802.220	199.349.010	330.872.190	-	-	530.221.200	90,67%	54.581.020
2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro	60 orang	60 orang	73.070.560	-	67.697.560	-	-	67.697.560	92,65%	5.373.000
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SMD usaha mikro	60 orang	60 orang	73.070.560	-	67.697.560	-	-	67.697.560	92,65%	5.373.000
E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	13,39%	12,67%	38.882.900	35.831.900	-	-	-	35.831.900	92,15%	3.051.000
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan untuk memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan	1 kegiatan	1 kegiatan	38.882.900	35.831.900	-	-	-	35.831.900	92,15%	3.051.000
a.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta peringatan hari koperasi dan SDM koperasi yang di tingkatkan kapasitasnya	125 orang	100 orang	38.882.900	35.831.900	-	-	-	35.831.900	92,15%	3.051.000

F.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	13,86%	15,88%	5.806.870.500	6.405.477.440	-	-	79.649.900	5.485.127.340	94,46%	321.743.160
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah usaha mikro yang di berdayakan melalui fasilitas perizinan, sosialisasi perijinan dan pengembangan produk dan SDM UMKM	930 orang	896 orang	5.806.870.500	6.405.477.440	-	-	79.649.900	5.485.127.340	94,46%	321.743.160
a.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas perizinan dan sosialisasi perizinan	690 orang	612 orang	460.692.500	227.743.440	-	-	-	227.743.440	49,44%	232.649.060
b.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah usaha mikro yang dikembangkan usahanya	240 orang	240 orang	5.346.178.000	5.177.734.000	-	-	79.649.900	5.257.383.900	98,34%	68.794.100
G.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	2,31%	4,37%	611.020.500	351.386.350	-	-	-	351.386.350	68,76%	159.634.150
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	jumlah usaha mikro yang mendapatkan pengembangan pemasaran	240 orang	250 orang	611.020.500	351.386.350	-	-	-	351.386.350	68,76%	159.634.150
a.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pemasaran dan pelatihan	240 orang	250 orang	611.020.500	351.386.350	-	-	-	351.386.350	68,76%	159.634.150
JUMLAH					12.468.907.692	9.613.313.974	398.569.750	534.753.000	174.414.900	10.894.818.644	87,38%	1.501.018.488

Perhitungan efisiensi anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja harus diutamakan. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri selama tahun 2021 telah melaksanakan penyerapan anggaran dalam rangka mencapai sasaran program yang ditetapkan. Melalui akuntabilitas keuangan / realisasi anggaran dapat diketahui analisis efisiensi dari penggunaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Efisiensi Cost per Outcomes tahun 2021

NO	Program	OUTCOMES	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN		
				ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyediaan administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	5.087.297.982	4.121.714.374	81,02%
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	158%	336.362.660	300.326.200	89,29%
3	Program Penilaian Kesehatan Kep/Usj Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	123%	30.600.270	28.746.700	93,94%
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	294%	584.802.220	571.685.680	97,76%
5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	95%	38.882.900	35.831.900	92,15%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	113%	5.808.870.500	5.485.127.340	94,46%
7	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	189%	511.020.500	351.306.350	68,76%
			93,14%			87,38%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran program/ *outcomes* sebesar 93,14%, sedangkan rata-rata serapan anggaran per *outcomes*/ program sebesar 87,38%. Ini menunjukkan capaian kinerja per *outcomes* lebih besar dari capaian serapan anggaran sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri tahun 2021 termasuk dalam kategori "efisien".

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja diharapkan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta membantu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 diketahui program-program dan kegiatan yang dinilai berhasil mencapai sasaran dan mana yang belum. Perbaikan dari program yang belum mencapai sasaran akan dilakukan pada tahun mendatang sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Selanjutnya dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini diharapkan dapat mengambil manfaat guna pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kediri sehingga bisa membangun Kabupaten Kediri menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu ini dan untuk lebih sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kediri, 31 Desember 2021

Plt KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN KEDIRI



MAMIEK AMIYATI, S.H., M.H

Penyuluh Utama Muda

NIP 19660720 199003 2 008